

MEMAHAMI KONSEP E-GOVERNANCE SERTA HUBUNGANNYA DENGAN E-GOVERNMENT DAN E-DEMOKRASI

Yani Nurhadryani

Dosen Jurusan Ilmu Komputer, FMIPA, IPB, Indonesia

Kampus IPB Darmaga JL Meranti Wing 20 Level V – Bogor.

Program Doktor pada *Graduate School of Information Sciences, Tohoku University, Japan*

e-mail: yhadryani@yahoo.com

Abstrak

E-Governance, E-government dan e-Demokrasi kerap kali mempunyai definisi yang saling tumpang tindih. Banyak yang mengartikannya sebagai penggunaan 'elektronik' terutama oleh sektor publik sebagai alat pada proses pemerintahan. Pendapat ini tidak keliru namun tidak menggambarkan seluruh aspek dari proses governance yang cukup kompleks. Berangkat dari problema tersebut paper ini mengkaji konsep governance kemudian mengintegrasikannya dengan penggunaan ICTs (Information Communication Technologies) sehingga menghasilkan framework e-Governance yang komprehensif. Paper ini merupakan studi literatur yang menjelaskan e-Governance dan hubungannya dengan e-Government dan e-Demokrasi dengan menggunakan konsep governance oleh Jon Pierre (2000) dan Mark Bevier (2007) serta konsep partisipasi dalam proses demokrasi oleh Antiroiko (2004) yang membahas potensi ICTs dalam proses demokrasi. Beberapa ilustrasi mengenai multi sektor, multi level serta dimensi governance ditunjukkan untuk memperjelas proses governance. Kemudian pembahasan mengenai framework e-Governance, e-Government dan e-Demokrasi diharapkan dapat menjelaskan hubungan dan perbedaan antara ketiga konsep tersebut.

Kata kunci : *e-Governance, e-Government, e-Demokrasi, Governance, Demokrasi, Partisipasi.*

1. PENDAHULUAN

e-Governance terdiri dari dua elemen penting yaitu 'governance' sebagai konsep utama dan 'electronic' atau ICTs (*Information and Communication Technologies*) sebagai alat untuk meningkatkan proses governance. Konsep governance berkembang sejak tahun 1980-an (Bevier,2007:364), sedangkan konsep e-Government pertamakali berkembang di Amerika pada tahun 1993 (Gronlund,2007:364), sementara konsep penggunaan internet dalam government mulai diidentifikasi sejak 1970-an (Gronlund,2007:364). Sejalan dengan berkembangannya konsep governance dan perkembangan ICTs berkembang pula konsep e-Governance, seiring dengan itu pula konsep e-Government dan e-Governance menjadi tumpang tindih. e-Governance seringkali didefinisikan sangat sederhana mirip dengan e-Government yaitu bagaimana pemerintah menggunakan ICTs untuk meningkatkan efisien terutama pada pelayanan publik. Kebanyakan penelitian e-Governance terkonsentrasi pada sektor publik, padahal konsep governance sesungguhnya yaitu terdiri dari banyak sektor, yang saling berhubungan dalam berbagai level/tingkat governance. Belakangan konsep e-Government terus berkembang, dengan menambahkan makna meningkatkan proses demokrasi, sehingga pendefinisian e-Government menjadi tumpang tindih pula dengan konsep e-Demokrasi. Pada dasarnya problema ini dikarenakan ketidakjelasan atas pemahaman konsep 'governance' sebagai konsep utama pada e-Governance.

Paper ini menjelaskan konsep 'e-Governance' yang diawali dengan menggali konsep 'governance' yang dikemukakan oleh Jon Pierre (2000) dan Mark Bevier (2007) untuk memahami ruang lingkup e-Governance serta hubungan antara e-Governance, e-Government dan e-Demokrasi. Framework governance tersebut diintegrasikan dengan ICTs sehingga menghasilkan konsep e-Governance yang komprehensif. Paper ini mencoba mencari keterkaitan antara ketiga konsep (e-Governance, e-Government dan e-Demokrasi) berdasarkan konsep partisipasi pada proses demokrasi yang dikemukakan oleh Ari-Veikko Antiroiko (2004) dan aliran informasi pada sistem politik menurut Nooris (2001).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perkembangan konsep governance atau pemerintahan; pergeseran paradigman era 'government' menuju era 'governance'. Perkembangan tersebut mencakup sektor-sektor yang terlibat dalam proses governance, level governance dan serta aspek penting dari proses governance yaitu demokrasi.

2.1 PERKEMBANGAN KONSEP GOVERNANCE: DARI ERA 'GOVERNMENT' MENUJU ERA 'GOVERNANCE'

Government atau pemerintah merupakan sektor publik yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan pemerintahan yaitu melaksanakan proses pembuatan kebijakan (perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik) serta menyelenggarakan pelayanan publik (Zacher,2007:542). Pada decade 1950-an dan 1960-an khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan terutama pembangunan ekonomi, pemerintah merupakan pemeran utama yang mempunyai wewenang yang besar dalam pembuatan kebijakan serta merupakan aktor yang dominan dalam pelaksanaan kebijakan (Santosa,2008:16). Namun pada tahun 1990-an terjadi pergeseran wewenang yang disebut dengan pergeseran paradigma era '*government*' (pemerintah) menjadi era '*governance*' (kepemerintahan). Pergeseran yang dimaksud adalah transfer wewenang dari pemerintah kepada sektor non-pemerintah seperti sektor privat, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat secara individual sehingga sektor non-pemerintah semakin meningkat dan terbuka aksesnya dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan (Yamamoto,2007,Anti-roiko,Pierre,2000).

Pergeseran ini terjadi dikarenakan kapasitas pemerintah yang kurang mampu dalam memenuhi perubahan tatanan organisasi (misalnya dengan terbentuknya organisasi internasional (misal PBB), dan organisasi regional (misalnya EU, ASEAN, APEC dll), tekanan sosial dan ekonomi (misalnya tuntutan untuk perubahan dalam kesejahteraan) serta berkembangnya proses globalisasi. Dengan demikian pemerintah tidak lagi menjadi aktor yang dominan namun bergantung pada pada sektor lainnya (Bevier,2007:364, Anti-roiko,2007:23)

Selain transfer wewenang dari pemerintah ke non-pemerintah, transfer wewenang juga terjadi antar level/tingkat governance. Level governance terdiri dari lima level yaitu level internasional, regional 1, nasional, regional 2 dan lokal. Transfer wewenang antar level governance bisa dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, transfer wewenang ke level lebih tinggi, misalnya dari pemerintah pusat ke level internasional (PBB) atau level regional 1 (EU, ASEAN,APEC). Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya isu internasional/regional yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri tetapi memerlukan koordinasi dengan negara lain atau organisasi internasional/regional untuk memecahkan masalah seperti isu perdagangan internasional, isu perubahan alam, penyakit endemik, kejahatan yang terorganisasi dll.

Kedua, transfer wewenang ke level yang lebih rendah misalnya transfer wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal/daerah seperti proses desentralisasi. Salah satu tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, meningkatkan accountabilitas dan meningkatkan proses demokrasi.

Terakhir, transfer wewenang dari pemerintah ke non-pemerintah (privat, organisasi non-profit), misalnya pemerintah melimpahkan sebagian pekerjaannya dalam pelaksanaan pelayanan publik atau mentranfer sebagian asset pemerintah kepada sektor privat (privatisasi) dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan effectiveness (Pierre,2000,Bevier,2007). transfer wewenang multi arah ini dapat dijelaskan pada tabel 1.

Transfer wewenang multi arah ini sependapat dengan yang dijelaskan oleh Yamamoto yang disebut dengan *multilevel schema* (Yamamoto,2007) dan *multi actor* (Yamamoto,2008).

Tabel 1. Contoh Tranfer Wewenang dari Pemerintah Pusat ke Level Lebih Tinggi, Bawah dan Non-pemerintah

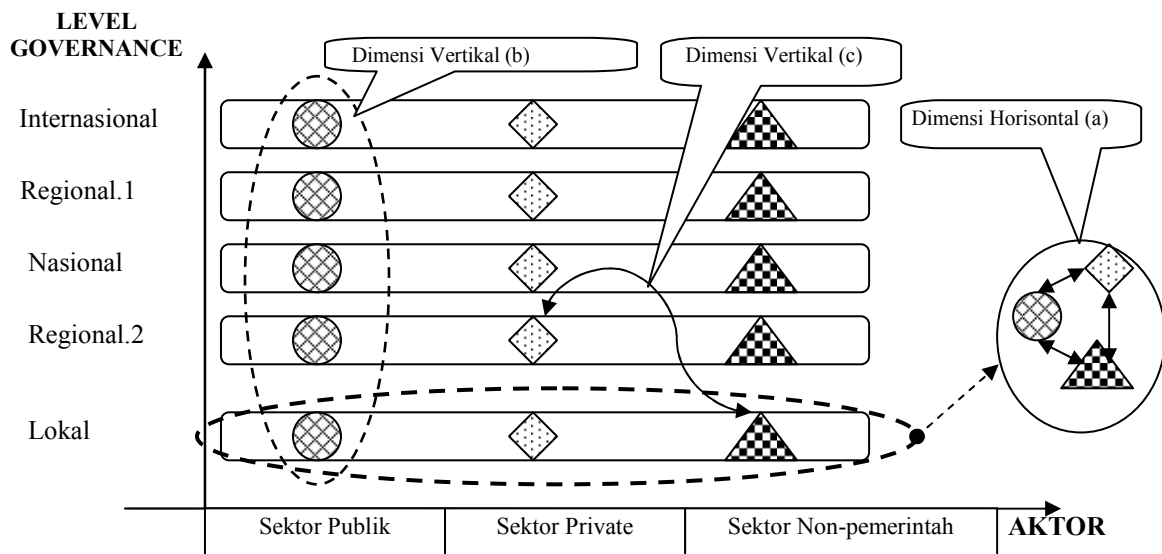
Transfer dari pe- Pemerintah pusat	ke level lebih tinggi	ke level lebih bawah	ke non-pemerintah
Aktor	- Organisasi internasional - Perusahaan transnasional	- Pemerintah daerah / lokal	- Sektor privat/ bisnis - Organisasi non-profit
Kegiatan	- Pembuatan kebijakan	- Proses desentralisasi	- Privatisasi
Tujuan	-Memecahkan masalah internasional /regional	-meningkatkan accoutabilitas -meningkatkan proses demokrasi	- meningkatkan efisiensi pada pelayanan publik.

Sehingga dari uraian governance dan tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa '*governance*' atau kepemimpinan adalah suatu proses dimana organisasi non-pemerintah (privat, organisasi non-profit) terus bertambah dalam penyelenggaraan pemerintahan (terutama proses pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik) secara simultan berkolerasi antar level local, regional 2, nasional, regional 1 dan global.

Sesuai dengan transfer wewenang yang bersifat multi arah (transfer antar sektor-sektor dan antar level governance) maka framework governance dapat dijelaskan dalam dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan horisontal yang dideskripsikan pada gambar 1. Gambar tersebut menunjukkan lima level governance yaitu internasional, regional 1, nasional, regional 2 dan lokal. Tiap level governance terdiri dari tiga sektor yaitu

sektor publik/ pemerintah, sektor privat dan sektor non-pemerintah (organisasi non-profit). Dimensi horisontal menunjukkan hubungan antar tiga sektor tersebut dalam level tertentu (a), sedangkan dimensi vertikal adalah hubungan antara sektor yang sejenis dalam level yang berbeda misalnya sektor publik di level lokal dan nasional (b). Selain itu hubungan bisa terjadi antar sektor yang berbeda jenis dan antar level yang berbeda pula, misalnya antara sektor publik di level lokal dengan sektor privat di level nasional (c).

Dari dimensi horisontal dan vertical tersebut mengakibatkan banyak kemungkinan kombinasi ini menunjukkan kompleksnya ruang lingkup governance yang tidak terkonsentrasi hanya pada sektor publik saja. Inilah yang merupakan prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi 'governance' (kepemerintahan) dengan pola pemerintahan yang tradisional/'government' yaitu terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan non-pemerintah (privat, organisasi non-profit) semakin ditingkatkan sehingga banyak sektor yang terlibat dalam proses governance. Namun perlu diingat bahwa semua kombinasi hubungan ini merupakan kondisi ideal dari suatu proses governance.



Gambar.1 Framework Governance: Dimensi Horisontal dan Vertical (Sumber: Nurhadryani,2009)

Framework ini berguna untuk menjelaskan ruang lingkup governance dan selanjutnya berimplikasi pada konsep e-Governance

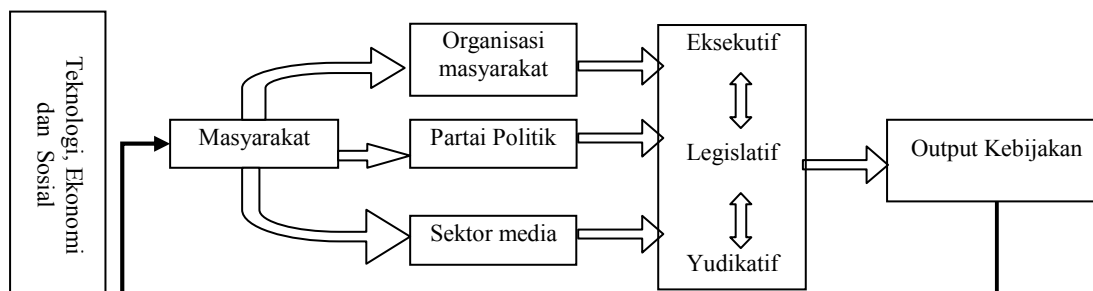
2.2 DEMOKRASI: PARTISIPASI MERUPAKAN ASPEK PENTING DALAM PROSES GOVERNANCE

Seiring dengan meningkatnya proses demokrasi, maka demokrasi juga merupakan aspek penting dalam proses governance. Demokrasi dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilannya dalam proses pemerintahan (Nooris,2007;164). Antiroiko menjelaskan bahwa partisipasi dalam politik secara konvensional yaitu ikut serta dalam pemilihan umum atau menjadi anggota aktif dalam suatu partai, namun sekarang ini yang terpenting adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi tidak selalu berarti ikut serta secara langsung tetapi partisipasi merupakan suatu proses yang kontinyu mulai dari partisipasi yang paling rendah (non-partisipasi) dimana masyarakat mempunyai kesempatan untuk menerima informasi saja (misal informasi mengenai pemerintah), kemudian meningkat ke tahap yang lebih tinggi seperti berdiskusi mengenai isu politik, ikut serta dalam proses voting suatu referendum, ikut serta dalam organisasi masyarakat atau organisasi politik tertentu, sampai dengan hal yang paling ekstrim yaitu ikut serta secara langsung seperti mengontrol implementasi kebijakan pemerintahan (Antiroiko,2004:36).

Partisipasi yang diterapkan pada setiap negara berbeda-beda sesuai dengan konteks dan jenis demokrasi yang dianut. Pada umumnya negara menganut sistem perwakilan. Demokrasi dalam sistem perwakilan menekankan pada komunikasi atau interaksi antar masyarakat, pemerintah dan pegawai pemerintahan dan meningkatkan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan sesuai dengan aspirasi masing-masing (Antiroiko,2004:42).

Disini terlihat bahwa hal yang penting dalam proses demokrasi adalah partisipasi termasuk komunikasi. Komunikasi berarti adanya aliran informasi antar aktor yang terlibat. Berbicara mengenai aliran informasi,

Nooris menjelaskan aliran informasi dalam sistem politik sederhana seperti pada gambar 2 berikut. Gambar tersebut menunjukkan aliran informasi dalam level nasional terjadi dimana organisasi masyarakat (organisasi non-profit, lembaga swadaya masyarakat), partai politik dan sektor media merupakan mediator antara masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini mereka menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai pemerintahan dan memfasilitasi masyarakat untuk memberikan input kepada pemerintah (eksekutif, yudikatif dan legislatif) yang selanjutnya input tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan, namun keputusan akhir masih terdapat pada pemerintah (Nooris,2001:97).



Gambar.2: *The Virtual Political System* (sumber: Norris, 2001: 97)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek terpenting dari proses governance adalah banyaknya sektor yang terlibat dan saling berinteraksi dalam level yang sama maupun berbeda serta pentingnya proses demokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan dengan cara meningkatkan kesempatan partisipasi semua sektor melalui distribusi informasi dan melakukan komunikasi. Pada bagian analisa dan pembahasan akan dibahas bagaimana peranan *ICTs* dalam proses governance yang kompleks tersebut yang merupakan inti dari konsepsi e-Governance.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 FRAMEWORK E-GOVERNANCE

Berdasarkan penjelasan konsep governance sebelumnya maka e-Governance dapat diartikan sebagai penggunaan *ICTs* dalam proses governance dimana terdapat banyak sektor yang terlibat (tidak hanya sektor publik tapi juga sektor privat dan sektor non-pemerintah) serta terjadi antar level governance yang berbeda (level internasional, regional 1, nasional, regional 2 dan local).

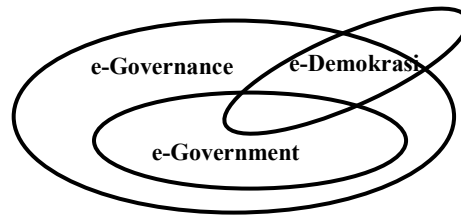
Merujuk pada tabel 1 dan gambar 1 e-Governance mempunyai ruang lingkup yang cukup luas yaitu mencakup banyak sektor dan level yang saling berkolaborasi, sehingga banyak jenis penelitian mengenai e-Governance yang sebelumnya banyak terkonsentrasi pada sektor publik saja yang biasa disebut dengan e-Government.

Misalnya pada sektor publik: bagaimana *ICTs* digunakan oleh pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan pemerintahan daerah dalam melaksanakan proses pemerintahan di bidang tertentu (kesehatan, pendidikan dll). Atau bagaimana *ICTs* digunakan oleh sektor publik dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan publik seperti mendistribusikan informasi mengenai pemerintahan, melaksanakan komunikasi dengan masyarakat. Pada proses desentralisasi, bagaimana *ICTs* digunakan oleh pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat lokal. Penelitian ini telah banyak dilakukan yang disebut dengan e-Government.

Sedangkan penelitian pada sektor non-pemerintah, seperti bagaimana lembaga swadaya masyarakat menggunakan *ICTs* untuk memfasilitasi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tertentu. Ditingkat Internasional, bagaimana *ICTs* digunakan untuk mengkoordinasikan aktor yang terlibat dalam membuat kebijakan internasional tertentu dalam isu tertentu. Ini merupakan salah satu penelitian yang mengarah ke e-Demokrasi.

Secara umum penggunaan *ICTs* yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi internet seperti websites, e-mail, mailing list dsb yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi kepada sektor-sektor yang terlibat, menyelenggaraan pelayanan publik kepada sektor yang terkait dan berkomunikasi antar sektor secara elektronik. Masyarakat dapat menerima banyak informasi lebih cepat dan efisien serta dapat berinteraksi dengan pemerintahan maupun sektor lainnya yang tidak terbatas oleh waktu dan jarak dibanding dengan sebelumnya. Tanpa *ICTs* proses governance sulit atau lamban untuk terwujud. Sehingga *ICTs* berpotensi untuk meningkatkan pelayanan publik yang merupakan fungsi e-Government dan meningkatkan kesempatan kepada masyarakat

untuk berpartisipasi yang merupakan tujuan dari e-Demokrasi. Sehingga penulis berargumentasi bahwa fungsi dari e-Governance juga mencakup fungsi dari e-Government dan e-Demokrasi. Hubungan antara tiga konsep tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 3. Penjelasan lebih lanjut mengenai e-Government dan e-Demokrasi dijelaskan pada bagian berikut.

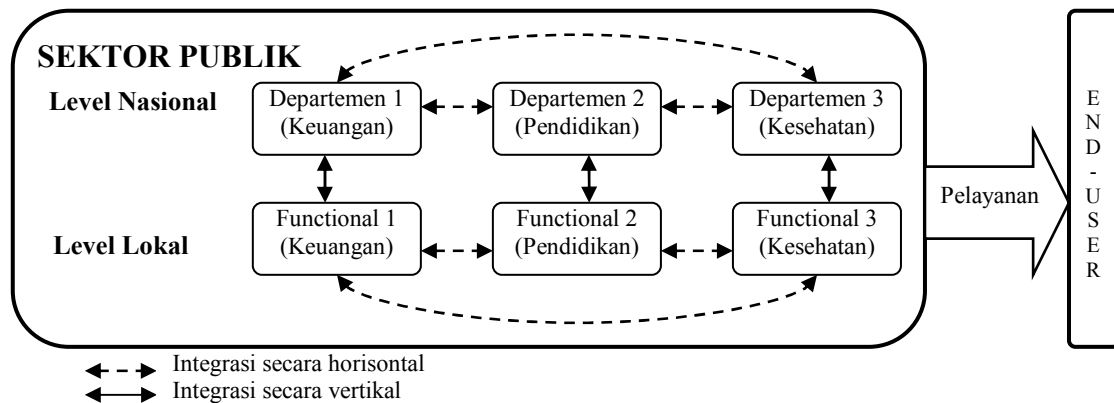


Gambar.3 Hubungan antar e-Governance, e-Government dan e-Demokrasi (Sumber : Nurhadryani,2009)

3.2 FRAMEWORK E-GOVERNMENT : FUNGSI INTERNAL DAN EKSTERNAL DARI E-GOVERNMENT

Aktor dalam e-Government secara sederhana dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama yaitu sektor publik sebagai penyelenggara pemerintahan yang terdiri dari eksekutif (departemen keuangan, pendidikan, kesehatan dsb), yudikatif dan legislatif pada level nasional, regional dan lokal. Aktor kedua disebut *end-user*, menurut konsep governance diatas *end-user* terdiri dari sektor non-pemerintah dan sektor privat yang berinteraksi di lima level governance.

Dari dua jenis aktor tersebut maka *ICTs* dapat digunakan untuk fungsi internal dan eksternal. Fungsi internal yaitu *ICTs* digunakan untuk proses administrasi dengan mengintegrasikan seluruh sektor internal dalam publik baik secara horisontal (integrasi antar departemen) maupun vertikal (integrasi antara level). Dengan meningkatnya integrasi internal baik secara vertikal dan horisontal maka diharapkan government mampu meningkatkan fungsi eksternalnya yaitu menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih baik terhadap *end-user*. E-government sebagai fungsi internal dan eksternal ini diilustrasikan seperti pada gambar 4.



Gambar.4 Framwork e-Government : Fungsi e-Government secara Internal dan Eksternal pada level nasional dan lokal

3.3 FRAMEWORK E-DEMOKRASI : PARTISIPASI SECARA ELEKTRONIK

Pada tinjauan pustaka dijelaskan bahwa bahwa hal yang penting dalam proses demokrasi adalah partisipasi termasuk komunikasi. Sekarang ini *ICTs* mempunyai kemampuan sebagai media untuk melakukan proses demokrasi tersebut. Seperti partisipasi yang dikemukakan oleh Antiroiko, maka *ICTs* mampu mendistribusikan informasi serta komunikasi sehingga *ICTs* berpotensi untuk meningkatkan kesempatan kepada masyarakat untuk partisipasi secara elektronik, ini adalah inti dari e-Demokrasi. Sesuai dengan system politik sederhana menurut Noorismaka *ICTs* merupakan alat untuk komunikasi antara masyarakat dan pemerintah melalui mediator di berbagai level governance.

Nooris mendefinisikan e-Demokrasi dalam dua bagian. Bagian pertama yaitu minimalis yang mencakup tiga komponen yaitu: pengaksesan informasi dan menggunakan pelayanan publik secara elektronik, kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan aparatur pemerintah secara elektronik, bertransaksi secara elektronik dengan pemerintahan (misalnya adanya fasilitas untuk feedback misalnya komentar terhadap proposal anggaran atau

regulation). Sedangkan tiga komponen lainnya pada bagian kedua yaitu *ICTs* digunakan untuk memfasilitasi masyarakat ikut berpartisipasi dalam program pemerintahan yang rutin, partisipasi masyarakat secara elektronik dalam proses pembuatan kebijakan (misal melalui *online* forum, *electronic town hall meeting*), berpartisipasi secara elektronik dalam pemilihan umum (*e-voting*) (Nooris,2007:166).

3.4 HUBUNGAN ANTARA E-GOVERNANCE, E-GOVERNMENT DAN E-DEMOKRASI

Dari uraian e-Government dan e-Demokrasi diatas, maka secara normatif hubungan antara e-Government dan e-Demokrasi dapat dijelaskan bahwa: melalui e-Government, masyarakat dapat menerima informasi dengan cepat dan transparan sehingga masyarakat mendapat pengetahuan mengenai bagaimana pemerintahan berjalan, dengan pengetahuannya tersebut dan sesuai dengan minat masing-masing, masyarakat dapat melakukan partisipasi melalui elektronik misalnya dengan berdiskusi dan berkomunikasi mengenai isu-isu dalam pemerintahan secara elektronik sehingga proses pemerintahan menjadi lebih demokrasi. Dengan demikian, kita dapat menarik argumentasi bahwa salah satu tujuan e-Government adalah e-Demokrasi, atau e-Government merupakan platform untuk e-Demokrasi. Sedangkan e-Government adalah salah satu komponen dari e-Governance karena government merupakan salah satu sektor dalam proses governance, begitu juga e-Demokrasi adalah salah satu komponen dari e-Governance, karena demokrasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses governance.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Governance atau pemerintahan adalah suatu proses dimana organisasi non-pemerintah (privat, organisasi non-profit) terus bertambah dalam penyelenggaraan pemerintahan (terutama proses pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik) secara simultan berkorelasi antar level governance baik lokal, nasional, regional maupun global. Sehingga konsep governance bersifat multi aktor, multi level serta multi arah dalam transfer wewenang. Dengan demikian e-Governance didefinisikan sebagai penggunaan *ICTs* pada proses governance/kepemerintahan yang multi aktor, multi level dan multi arah dalam dimensi horisontal dan vertikal.

Sedangkan hubungan antara ketiga konsep: e-Governance, e-Government dan e-Demokrasi adalah: pertama, e-Government merupakan salah satu komponen dari e-Governance karena government merupakan salah satu sektor dalam proses governance. Kedua, e-Demokrasi adalah salah satu komponen dari e-Governance, karena demokrasi merupakan aspek penting dalam proses governance. Terakhir penulis juga menarik argumentasi bahwa salah satu tujuan e-Government adalah e-Demokrasi, atau e-Government merupakan platform untuk e-Demokrasi.

Diharapkan dengan konsep e-governance yang berdasarkan teori governance ini dapat menuntun peneliti dalam melakukan penelitian e-governance, tidak terfokus pada publik sektor saja namun diharapkan juga pada sektor non-pemerintah yang sekarang ini mempunyai peranan cukup signifikan sesuai dengan tuntutan perkembangan proses governance.

Untuk penelitian selanjutnya perlu dikembangkan satu dimensi lain dari konsep governance yaitu model governance menurut Paul Hirst (2000) yang terdiri dari *Good Governance*, *Cooperate Governance*, *Network Governance*, *New Public Governnce* dan *International Governance* sehingga dapat lebih memperjelas dan memperkaya konsep e-Governance.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anttiroiko, Ari-Veikko (2004), *Introduction to Democratic e-Governance*, pada: Matti, Malkia, Ari-Veikko Anttiroiko and Reijo Savolainen (eds.), *e-transformation in Governance: New Directions in Government and Politics*, Hershey: Idea Group Publishing.
- Bevier, Mark (2007), *Governance*, pada: Bevier, Mark (ed.), *Encyclopedia of Governance, Vol. I*, Los Angeles: Sage Publication.
- Gronlund, Ake (2007), *Electronic Government*, pada: Anttiroiko, Ari-Veikko and Matti Malkia (eds.), *Encyclopedia of Digital Government, Volume I*, Hershey: Idea Group Reference.
- Norris, Donald F. (2007), *Electronic Democracy at the American Grassroots*, pada: Norris, Donald F. (ed.), *Current Issues and Trends in E-Government Research*, Hershey: Cyber Tech Publishing.
- Norris, Pippa (2001), *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Nurhadryani, Yani (2008), *e-Government dan e-Governance: A Case Study of Local Government in Indonesia*, *Japan Academy of Koeki Studies*. 8-2: 42-45. Japan
- Nurhadryani, Yani (2009), *Eksplorasi the Links between e-Governance, e-Government and e-Democracy: How ICTs Contribute to Democratization*. *Japan Academy of Koeki Studies*. Japan (proses review).
- Pierre, Jon and B. Guy Peters (2000), *Governance, Politics and The State*, London: Macmillan Press LTD.
- Santosa, Pandji (2008), *Administrasi Publik: teori dan Aplikasi Good Governance*, PT. Refika Adiatama. Bandung, Indonesia.
- Yamamoto, Hiraku (2007), *Multi-level Governance and Public Private Partnerships: Theoretical Basis of Public Management*, *Interdisciplinary Information Sciences*, 13-1: 65-88.
- Yamamoto, Hiraku (2008), *Governance including Government: Multiple Actors in Global Governance*, *Interdisciplinary Information Sciences*, 14-2: 117-131.
- Zacher, Lech W. (2007), *E-Government in the Information Society*, pada: Anttiroiko, Ari-Veikko and Matti Malkia (eds.), *Encyclopedia of Digital Government, Volume I*, Hershey: Idea Group